



## Rp4,5 Miliar untuk Pilkades Serentak

SUNGAI RAYA - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kubu Raya saat ini tengah mempersiapkan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kubu Raya yang rencananya akan digelar pada Oktober 2023 mendatang. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kubu Raya, Budi Mulyono mengutarakan pada tahun 2023 ini terdapat sebanyak 24 desa di Kubu Raya yang akan mengikuti Pilkades serentak.

Pemerintah kabupaten sendiri telah mengalokasikan anggaran melalui APBD kabupaten sekitar Rp2,9 miliar.

Angka itu masih ditambah anggaran sekitar Rp1,6 miliar yang dialokasikan 24 desa melalui APBDDes desa masing-masing. "Sebanyak 24 desa yang akan mengikuti Pilkades serentak tahun ini termasuk lima desa baru yang telah mendapatkan kode desa seperti Desa Suku lanting, Permata Jaya, Padi Jaya, Rengas Kapuas dan Parit Keladi," kata Budi Mulyono kepada Pontianak Post, Selasa (21/2) di Sungai Raya.

Sesuai dengan edaran Kemendagri, kabupaten yang akan menggelar Pilkades serentak di tahun ini, lanjutnya tidak boleh melewati tanggal 1 November melakukan

pemungutan suara Pilkades serentak. "Insya Allah, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya siap menggelar pemungutan suara untuk Pilkades serentak sebelum 1 November. Kami maklum juga, karena pertimbangan jika dilakukan diatas 1 November khawatir mengganggu tahapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 mendatang," ungkapnya.

Belum lama ini kata Budi, pihaknya juga telah mengundang sebanyak 24 perwakilan Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk diberikan sosialisasi tahap awal terkait pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2023 di Kubu Raya.



**PILKADES:** Puluhan perwakilan pemerintah desa dan perwakilan BPD mengikuti sosialisasi tahap awal pada Rapat Pilkades serentak tahun 2023 di Kubu Raya.

Menurutnya, pada Pilkades serentak tahun ini terdapat sejumlah perbedaan regulasi kebijakan jika dibandingkan Pilkades serentak di tahun

2017 lalu. Misalnya saja pada Pilkades tahun 2017 lalu, mengacu pada Permendagri nomor 112, yang mengatur setiap calon Kades hanya

boleh berasal dari desa setempat, namun saat ini aturan Peermendagri sudah dua kali menjadi Permendagri nomor 65, yang mengatur setiap calon Kades bisa berasal dari desa mana saja di wilayah Indonesia.

Disinggung mengenai tanggal pelaksanaan Pilkades serentak, kata Budi, pihaknya telah memberikan usulan pelaksanaan Pilkades serentak pada 17 Oktober mendatang. Namun akan kembali dibahas pada Rapat koordinasi yang akan dilakukan pihaknya dalam waktu dekat. "Jika tidak ada halangan, kami perkirakan tahapan pencalonan mulai pada Juli. Nanti

ketentuannya jika memang di satu desa terdapat lebih dari lima calon, maka akan dilakukan seleksi tambahan yakni tes tertulis yang akan difasilitasi pemerintah kabupaten," ungkapnya.

Budi menambahkan, perbedaan lain pada pelaksanaan Pilkades serentak di tahun ini, yakni setiap calon Kades akan diberikan pembekalan terkait tata Kelola pemerintahan desa. "Tujuannya, kami ingin meningkatkan pemahaman para Cakades ini terkait tata kelola pemerintahan desa. Termasuk pengelolaan keuangan desa dan sejenisnya," pungkas Budi Mulyono. (ash)